
**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2014 TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT HEWAN DI UPTD RUMAH SAKIT
HEWAN PROVINSI SUMATERA SELATAN (STUDI KASUS PASAL 62)**

OLEH :

**ZEFANI SABAR HATI GIAWA : 19.11.086
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA**

ABSTRACT

Zefan, 2023, Implementation of Government Regulation Number 47 of 2014 concerning Animal Disease Control and Management in South Sumatra Province Veterinary Hospitals? (Case Study Article 62), Department of State Administration at the Satya Negara Palembang College of State Administration (STIA). M. Sattarnudin, S.Sos., M.Si as supervisor I and Djisman T, S.S., M.Si as supervisor II.

The problem in this research is how to implement the policy of Government Regulation Number 47 of 2014 concerning the Control and Management of Animal Diseases in UPTD Hospitals of South Sumatra Province, (Case Study Article 62) and what are the obstacles to implementing the Policy of Government Regulation Number 47 of 2014 concerning Disease Control and Management Animals at the UPTD Animal Hospital of South Sumatra Province, (Case Study Article 62).

The aim of this research is: To analyze the implementation of Government Regulation Policy Number 47 of 2014 concerning the Control and Management of Animal Diseases in Animal Hospitals in South Sumatra Province, (Case Study Article 62) and to identify obstacles in the Implementation of Government Regulation Number 47 of 2014 concerning Policy Control and Management of Animal Diseases at the Animal Hospital of South Sumatra Province, (Case Study Article 62).

This research uses qualitative descriptive research. Descriptive research method. Next, descriptive techniques were used to find out and describe how to implement Government Regulation Number 47 of 2014 Article 62 concerning the Control and Management of Animal Diseases at the Animal Hospital in Sukarami District, South Sumatra Province.

The results of the analysis of test data which was strengthened by data, analysis of questionnaire data and interviews, it was found that there was a large influence on providing incentives, controlling and overcoming animal diseases on animal handlers.

Keywords: Implementation, Control and Management of Animal Diseases

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki kekayaan keanekaragaman hayati yang sangat besar (*mega biodiversity*) berupa sumber daya hewan dan tumbuhan, sebagai anugerah sekaligus amanah Tuhan Yang Maha Esa. Kekayaan tersebut perlu dimanfaatkan dan dilestarikan dalam mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam rangka memanfaatkan dan melestarikan keanekaragaman hayati tersebut diselenggarakan peternakan dan kesehatan hewan secara sendiri maupun terintegrasi dengan pertanian, perkebunan, perikanan, dan kehutanan; dengan pendekatan sistem agrobisnis peternakan dan sistem kesehatan hewan; serta penerapan asas kemanfaatan dan keberlanjutan, keamanan dan kesehatan,

kerakyatan dan keadilan, keterbukaan dan keterpaduan, kemandirian, kemitraan, dan keprofesionalan. Kedua hal tersebut harus diselenggarakan secara sinergis untuk melindungi dan meningkatkan kualitas sumber daya hewan; menyediakan pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal; meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, hewan, dan lingkungan; menyediakan jasa dan bahan baku industri; mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi; meningkatkan pendapatan dan devisa negara; memperluas kesempatan berusaha dan kesempatan kerja; serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada Hewan antara lain, disebabkan oleh cacat Genetik, proses degenerative, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit dan infeksi mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, cendawan dan rickettsia (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014).

Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan, dinyatakan secara tegas bahwa pengaturan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menjadi bagian penting untuk mempertahankan status kesehatan hewan nasional, melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman penyakit hewan dan/atau gangguan kesehatan manusia, hewan, dan ekosistemnya melalui kegiatan pengamatan dan pengidentifikasian, pencegahan, pengamanan, pemberantasan, dan/atau pengobatan penyakit hewan. Agar kegiatan-kegiatan tersebut dapat diselenggarakan dengan efektif dan efisien, perlu dilengkapi dengan persyaratan teknis kesehatan

Hewan ketika hewan dilalulintaskan, baik dalam hubungan antar negara berupa pemasukan dan pengeluaran, maupun dalam lalu lintas antar pulau di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau lalu lintas antar wilayah dalam satu pulau dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2014 pasal 1 ayat (5), Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara yang dipelihara maupun dihabitatnya.

Dalam Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dilakukan dengan cara Penanganan Hewan Sakit.

Berdasarkan Pasal 62 tentang Penanganan Hewan sakit terdapat beberapa tahapan dalam penanganan tersebut antara lain:

1. Dilakukan terhadap Hewan terduga sakit sesuai dengan jenis Hewan serta jenis penyakit dan sifat penyakit Hewan.
2. Melalui perawatan, depopulasi, eliminasi, euthanasia, pemotongan bersyarat atau pemusnahan Hewan di daerah tertentu.
3. Tindakan dilakukan oleh peternak, pemelihara dan penanggung jawab Hewan Sakit atau terduga sakit dibawah pengawasan otoritas veteriner setempat.

Penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan untuk pemasukan hewan, produk hewan non pangan, media pembawa penyakit hewan lainnya, dan persyaratan teknis kesehatan hewan untuk pengeluaran hewan dan produk hewan non pangan, serta persyaratan teknis kesehatan hewan dalam lalu lintas antar kawasan pengamanan Penyakit Hewan Menular Strategis di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia didasarkan pada status kesehatan hewan berkaitan dengan jenis

hewan dan jenis Penyakit Hewan Menular Strategis serta Penyakit Hewan Eksotik dari negara atau daerah asal atau unit usaha, peliharaan dan dihabitatnya.

Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakan) dan Rumah Sakit Hewan Provinsi Sumatera Selatan dalam kapasitasnya sebagai fasilitator, akselerator dan regulator masyarakat dalam mengelola sumber daya tersedia, termasuk sumber daya urusan dan kewenangan pemerintah pada sektor peternakan dan perikanan dalam mendorong kinerja ditempuh melalui berbagai kebijakan dan program yang mengacu kepada dokumen perencanaan pembangunan. Sampai saat ini pembangunan peternakan dan perikanan belum sepenuhnya mampu memberikan kesejahteraan bagi para peternak, pembudidaya, dan pemelihara.

Berdasarkan observasi awal di UPTD rumah sakit hewan provinsi Sumatera Selatan sudah bisa dikatakan baik, dan adapun yg masih perlu di lengkapi dalam proses penanganan Hewan sakit antara lain, tempat penanganan pemeriksaan, tenaga medik otoritas veteriner serta obat dan berbagai peralatan di rumah sakit hewan tersebut.

Berdasarkan Observasi tersebut penulis tertarik meneliti problem yang ada dengan mengambil judul” Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulan Penyakit Hewan di UPTD Rumah Sakit Hewan Provinsi Sumatera Selatan. (Studi kasus Pasal 62).

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan di UPTD Rumah Sakit Provinsi Sumatera Selatan, (Studi Kasus Pasal 62)?
2. Bagaimana Hambatan Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan di UPTD Rumah Sakit Hewan Provinsi Sumatera Selatan, (Studi Kasus Pasal 62)?

3. Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses dengan menggunakan metode ilmiah untuk dapat menemukan, mengembangkan serta menguji kebenaran ilmu pengetahuan. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui Menganalisa Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan penyakit Hewan di Rumah Sakit Hewan Provinsi Sumatera Selatan, (Studi Kasus Pasal 62).

Mengidentifikasi Hambatan dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan di Rumah Sakit Hewan Provinsi Sumatera Selatan, (Studi Kasus Pasal 62).

B. LANDASAN TEORI

Pengertian Implementasi

Suatu Kebijakan yang telah dirumuskan tentunya memiliki tujuan-tujuan atau target tertentu yang ingin dicapai. Pencapaian target baru akan terealisasi jika kebijakan tersebut telah di implementasikan .

Pengertian Implementasi secara umum, artinya “implementasi adalah suatu penerapan atau tindakan berdasarkan yang dilakukan berdasarkan rencana yang telah disusun atau dibuat secara cermat dan perinci sebelumnya, pendapat lain mengatakan bahwa pengertian implementasi adalah suatu tindakan atau bentuk aksi nyata dalam melaksanakan rencana yang telah dirancang dengan matang. Dengan kata lain, implementasi hanya dapat dilakukan jika sudah ada perencanaan dan bukan hanya sekedar tindakan semata”.

Terdapat berbagai pendapat para ahli dan akademis yang mengemukakan tentang pengertian implementasi. Hal ini perlu dijelaskan agar pemahaman tentang implementasi dapat disinkronisasikan dari konsep penelitian terhadap suatu kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Karena implementasi merupakan kegiatan yang penting dari keluruhan proses perencanaan kebijakan.

Pengertian Implementasi menurut Para Ahli

Menurut Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti (2012:21) “Implementasi yaitu kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (to deliver policy output) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (target group) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan”.

Sedangkan Menurut Pressman dan Wildavsky sebagaimana dikutip oleh Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti (2012:20) Implementasi dimaknai dengan beberapa kata kunci sebagai berikut: "Untuk menjalankan

kebijakan (to carry out), untuk memenuhi janji-janji sebagaimana dinyatakan dalam dokumen kebijakan (to fulfill), untuk menghasilkan output sebagaimana dinyatakan dalam tujuan kebijakan (to produce), untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan dalam tujuan kebijakan (to complete)".

Proses Penerapan Implementasi

Menurut Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti (2012:22) Proses implementasi kebijakan publik mencakup beberapa tahap yaitu:

- a. Tahap Interpretasi (Interpretation) Tahap interpretasi merupakan tahapan penjabaran sebuah kebijakan yang bersifat abstrak ke dalam kebijakan yang lebih bersifat teknis operasional Aktivitas terpretasi kebijakan tidak sekedar menjabarkan sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak ke dalam kebijakan yang bersifat lebih operasional.
- b. Tahapan pengorganisasian ini lebih mengarah pada proses kegiatan pengaturan dan penetapan siapa yang menjadi pelaksana kebijakan (penentuan lembaga organisasi mana yang akan melaksanakan, dan siapa. pelakunya) penetapan anggaran (berapa besarnya anggaran yang diperlukan dari mana sumbernya bagaimana menggunakan dan mempertanggungjawabkan), penetapan prasarana dan sarana (apa yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan), penetapan tata kerja, dan penetapan pola kepemimpinan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan Tahap Aplikasi Application)
- c. Tahapan aplikasi merupakan tahap penerapan rencana proses implementasi kebijakan ke dalam realitas nyata. Tahap aplikasi merupakan perwujudan dan pelaksanaan masing masing kegiatan dalam tahapan yang telah disebutkan sebelumnya.

Tujuan Implementasi

Implementasi ditujukan untuk mencapai tujuan, Menurut (Faried Ali dan Andi Syamsu Alam 2012; 16) bahwa tujuan itu pada umumnya adalah untuk

- a. Memelihara ketertiban umum (negara sebagai stabilisator)
- b. Melancarkan perkembangan masyarakat dalam berbagai hal (negara sebagai koordinator)
- c. Memperuntukkan dan membagi berbagai materi (negara sebagai pembagi alokasi)

Teori Implementasi

Terdapat beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi Kebijakan yang dirumuskan oleh Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (008:141-144) yaitu:

A. Teori Implementasi menurut Van Meter dan Van Horn

Ada enam teori menurut Van Meter dan Van Horn, yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik yaitu Ukuran dan Tujuan

- a. Ukuran dan tujuan
kebijakan diperlukan untuk mengarahkan dalam melaksanakan kebijakan hal tersebut dilakukan agar sesuai dengan program yang sudah direncanakan.
- b. Sumber Daya
Keberhasilan proses implementasi kebijakan yang dipengaruhi oleh pemanfaatan sumber daya manusia, biaya, dan waktu
- c. Karakteristik Agen Pelaksana
Keberhasilan kebijakan bisa dilihat dan sifat atau ciri-ciri badan instansi pelaksana kebijakan.
- d. Sikap Kecenderungan para Pelaksana
Keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik, hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan.
- e. Komunikasi Antar organisasi dan Aktivitas Pelaksanaan Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik, semakin baik komunikasi yang terjalin maka semakin kecil kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam suatu proses implementasi.
- f. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik
Keberhasilan implementasi dapat terjadi jika lingkungan eksternalnya kondusif oleh sebab itu lingkungan eksternal mempengaruhi keberhasilan dari implementasi kebijakan.

B. Teori Implementasi menurut George C. Edward III

Teori George C. Edward III dalam Agustino (2008:149). Dalam pendekatan ini terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan yaitu:

- a. Komunikasi
Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Hal ini akan berjalan bila komunikasi juga berjalan dengan baik, kebijakan yang dikomunikasikan harus tepat, akurat dan konsisten.
- b. Sumberdaya
Indikator keberhasilan sumberdaya adalah staff, dan informasi, wewenang dan fasilitas.

Implementasi kebijakan agar berhasil harus dilaksanakana oleh staf yang memadai dan berkompeten, informasi yang jelas tentang cara melaksanakan kebijakan.

- c. Disposisi aton sikap dari pelaksana kebijakan.
Hal yang perlu dicermati dalam variabel ini adalah pengangkatan birokrat. Dimana pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan harus orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang ditetapkan.
- d. Struktur birokrasi Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang

C. Teori Implementasi Daniel Mazmanian dan Paul Sebatier

Teori Daniel Mazmanian dan Paul Sebatier dalam Agustino (2008:144 mereka berpendapat bahwa peran penting dari “implementasi kebijakan publik adalah kemampuannya dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses”. Implementasi Menurut teorsin, implementasi kebijakan dapat diklasifikasikan ke dalam tiga variabel yaitu:

- a. Variabel Independen
Variabel mudah tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek dan perubahan seperti apa yang dikehendaki
- b. Variabel Intervening
Variabel dengan kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan
- c. Variabel Dependen
Variabel variabel yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosial ekonomi dan teknologi. dukungan publik, sikap dan risorsis konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi dan komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.

D. Teori Implementasi Meinlee S. Grindle

Teori Merilee S Grindle, keberhasilan implementasi suatu kebijakan dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (outcomes), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang diinginkan. Keberhasilan suatu implementasi dapat dilihat dari dua hal yakni:

- a. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (design) dengan merujuk pada aksi kebijakan

- b. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu dampaknya terhadap masyarakat secara individu atau kelompok dan tingkat perubahan yang terjadi.

Indikator Implementasi

Jika dikaitkan dengan kebijakan publik, indikator merupakan instrument penting untuk mengevaluasi implementasi suatu kebijakan. Ciri-ciri indikator yang baik menurut Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti (2012:25) yaitu:

- Memiliki relevansi dengan kebijakan atau program yang akan dievaluasi
- Memadai, dalam arti jumlah indikator yang kita gunakan memiliki kemampuan menggambarkan secara lengkap kondisi tercapainya tujuan suatu kebijakan

“Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan” (Subarsono, 2010:70).

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna.

Model-model Implementasi

Menurut Bambang Sunggono (1994: 149-153) Model Implementasi sebagai berikut:

- Dukungan Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat penting apabila tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan
- Pembagian Potensi Sebab akibat yang berkaitan dengan pelaksanaan implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian kekuasaan diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi

Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah secara matang dan terperinci.

Model Implementensi Kebijakan

Mode Implementasi kebijakan publik merupakan suatu kerangka untuk melakukan analisis terhadap proses implementasi kebijakan publik. Model implementasi berisi variabel-variabel dan faktor yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan dari keseluruhan proses implementasi kebijakan publik. Berikut ini model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan menurut para ahli

1. Model Implementasi Menurut Van Meter dan Van Horn

Van Meter dan Van Horn dalam (A. Wahab, 2004:78) teorinya ini beranjak dari sebuah argumen bahwa: "Perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh faktor kebijakan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya mereka menawarkan suatu pendekatan yang mencoba untuk menghubungkan antar kebijaksanaan dengan implementasi dan suatu model konseptual yang mempertalikan kebijakan dengan prestasi kerja (Performance). Hal yang dikemukakan oleh kedua ahli diatas ialah bahwa jalan yang menghubungkan antara kebijaksanaan dan prestasi kerja dipengaruhi oleh sejumlah variabel bebas (Independent Variable) yang saling berkaitan". Variabel variabel bebas itu adalah:

- Ukuran dan Tujuan Kebijaksanaan
- Sumber-sumber kebijaksanaan
- Ciri-ciri atau sikap Badan/Instansi pelaksana
- Komunikasi antar Organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
- Sikap para pelaksana dan,
- Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.

2. Model Implementasi menurut Merilee S. Grindle:

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (Subarsono, 2013: 93) dipengaruhi oleh dua variabel besar. Yakni isi kebijakan dan lingkungan implementasi, Variabel isi kebijakan ini mencakup:

- Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat dalam isi kebijakan
- Jenis manfaat yang diterima oleh target group.
- Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan
- Apakah letak sebuah program sudah tepat.

Berdasarkan konsep tersebut, maka permasalahan yang perlu dikaji adalah hambatan apakah yang terjadi dalam mengenalkan perubahan dalam suatu organisasi? (hal ini berhubungan dengan kemuasaan dari pihak yang paling rendah

tingkatannya dalam organisasi). Seberapa penting keterikatan masing-masing orang dalam organisasi? (hal ini terkait dengan masalah kepatuhan). Berdasarkan pandangan ini Van Meter dan Van Horn membuat tipologi kebijakan menurut:

- Jumlah masing-masing perubahan yang dihasilkan,
- Jangkauan atau lingkup kesepakatan terhadap tujuan diantara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi.

Tahapan-tahapan Penanganan Hewan Sakit

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 62 undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan.

Dalam Pasal 62, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014, Penanganan Hewan Sakit dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- Penanganan Hewan Sakit dilakukan terhadap Hewan Sakit atau terduga Sakit sesuai dengan jenis Hewan serta jenis penyakit dan sifat penyakit Hewan.
- Penanganan Hewan Sakit melalui Perawatan, depopulasi, eliminasi, euthanasia, pemotongan bersyarat dan/atau Pemusnahan Hewan di daerah tertentu.
- Tindakan Penanganan Hewan Sakit dilakukan oleh peternak, pemelihara, dan/atau Penanggung jawab Hewan Sakit atau terduga sakit dibawah pengawasan otoritas veteriner setempat.

Didalam Peraturan Pemerintah ini membahas secara khusus tentang pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan yakni Pasal 62, yaitu tentang Penanganan Hewan Sakit.

Penanganan merupakan cara penanganan atau memegang satwa sebelum diperiksa dan/atau diberikan perlakuan lain dengan cara menghalangi, mengurangi gerak aksi dari satwa secara fisiki. (Buku panduan penanganan *heandling satwa* satwa mamalia).

Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada Hewan yang antara lain disebabkan oleh cacat genetic, proses degenerative, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi, parasit, dan infeksi mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, cendawan dan rickettsia (UU Nomor 41 Tahun 2014).

Penyakit Hewan Menular strategis adalah Penyakit Hewan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau kematian Hewan yang tinggi (UU Nomor 41 Tahun 2014).

Berdasarkan Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di Rumah Sakit Hewan Provinsi Sumatera Selatan yang terletak di Jalan Peternakan Raya Kecamatan Sukarami, masih belum sepenuhnya terlaksana, disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

- Kurangnya tenaga otoritas veteriner/medis.
- Obat dan Peralatan dalam menangani Penyakit Hewan masih kurang lengkap
- Terdapat kekurangan media seperti Internet dan komputer.
- Obat dan peralatan yang di pergunakan tidak sepenuhnya ada.

Untuk memperjelas alur tahapan berdasarkan jenis Hewan, jenis kelamin, Penyakit dan gejala klinis pada Rumah Sakit Hewan Kecamatan Sukarami Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini

No	Jenis Hewan	Jenis kelamin	Gejala klinis	Penyakit
1	Kucing	jantan	Lemas, lesuh, tidak mau makan dan habis melahirkan	Trauma
2	Sapi	Betina	Penurunan produksi susu yang drastis	Bakteri
3	Anjing	Betina	Mata merah, tidak mau makan	Virus,bakteri, rabies
4	Burung	Jantan	Sakit kepala,sakit tenggorokan.	Infeksi bakteri dan jamur, mencabuli bulu

Dasar Hukum Penanganan Penyakit Hewan

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

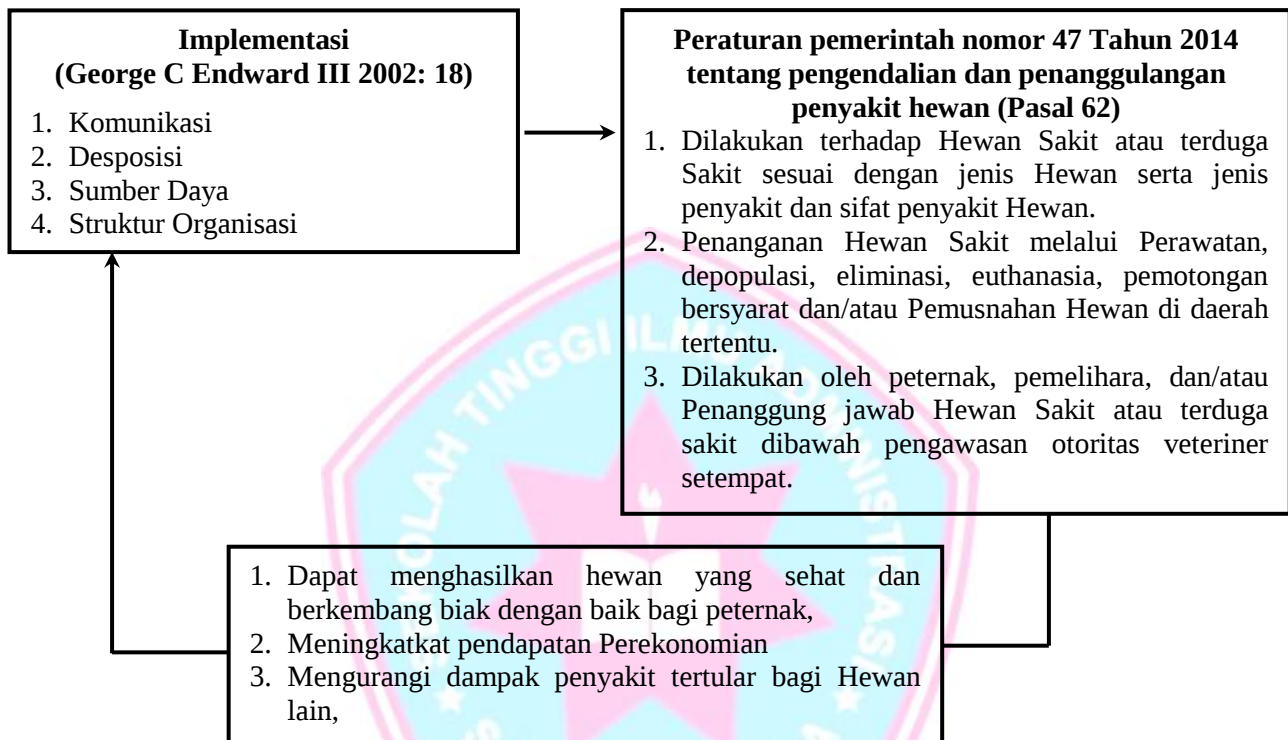
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan penanggulangan penyakit Hewan
5. Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kerangka Berpikir

Kerangka Berpikir adalah model konseptual yang dimanfaatkan sebagai teori yang ada kaitannya dengan beberapa yang diidentifikasi sebagai masalah penting. (Sugiyono, 2017). Kerangka Berpikir Penelitian ini dapat dilihat pada Bagan dibawah ini.

Gambar Kerangka Berpikir



Kerangka pikir di atas mendeskripsikan bahwa dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji Penanganan Hewan Sakit Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Pasal 62. Kemudian penulis akan mengumpulkan data-data dari masyarakat tentang masalah serta kendala yang dihadapi dalam Penanganan Hewan Sakit dan mencoba memecahkan masalah dengan mencari solusi atau problem solving, dengan mengambil lokasi di Kecamatan Sukarami.

Penanganan adalah proses penentuan apa yang akan dicapai, yaitu standar, apa yang sedang dihasilkan, yaitu bila perlu mengambil tindakan korektif sehingga pelaksanaan dapat berjalan sesuai rencana, yaitu sesuai standar.

Berdasarkan kerangka berpikir diatas mendapatkan manfaat/harapan yang akan dicapai kedepannya.

C. PROSEDUR PENELITIAN

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif menurut Sugiyono (2012:72) adalah merupakan pendekatan rasional yang memberikan kerangka pikir yang koheren dan logis, sedangkan pendekatan empiris memberikan kerangka pengajuan dalam memastikan suatu kebenaran. Penelitian ini mengenai fakta strategi Implementasi Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Pasal 62 di UPTD Rumah Sakit Hewan Provinsi Sumatera

Defenisi Konsep

Definisi konsep adalah unsur penelitian yang menjelaskan tentang karakteristik sesuatu masalah yang hendak diteliti. Berdasarkan landasan teori yang telah dipaparkan di atas, dapat dikemukakan definisi konseptual dari masing-masing variabel,

Untuk mendapatkan batasan yang lebih jelas masing-masing konsep yang akan diteliti maka penulis mengemukakan definisi dari beberapa konsep yang digunakan, agar tidak terjadi kekaburan dalam memahami penelitian ini, maka penulis kemukakan definisi konseptual masing-masing variabel dari penelitian ini yaitu:

- Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. (Agustino, 2012:139)
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 Pasal 62 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan di Rumah Sakit Hewan Kecamatan Sukarami Provinsi Sumatera Selatan.

Defenisi konsep adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial, dengan menggunakan suatu istilah untuk beberapa kejadian yang berkaitan satu sama lainnya (Singarimbun dan Efendi, 2011)

Defenisi Operasional

Menurut Singarimbun dan Efendi, (2011:146). Defenisi operasional berisikan indikator dari suatu variabel yang memungkinkan peneliti mengumpulkan data secara relevan untuk variabel

tersebut. Variabel yang peneliti gunakan sesuai dengan model implementasikan variabel kebijakan, organisasi dan lingkungan. Penelitian itu perlu diarahkan karena melalui pemilihan kebijakan yang tepat maka masyarakat dapat dipartipasikan memberikan kontribusi yang optimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Definisi operasional digunakan untuk memberikan pengertian yang operasional dalam penelitian. Definisi ini digunakan sebagai landasan dalam merinci kisi-kisi instrumen penelitian. Nazir (1999:152) mengemukakan sebagai berikut:

Definisi operasional adalah definisi yang diberikan kepada suatu variabel atau konstruk dengan cara memberikan arti, atau menspesifikasi kegiatan, ataupun memberikan suatu operasionalisasi yang diperlukan untuk mengukur konstruk atau variabel tertentu.

Adanya definisi operasional tersebut berarti terdapatnya indikator yang akan diukur dalam suatu penelitian mengacu dengan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 Pasal 62 Tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan di Rumah Sakit Hewan Provinsi Sumatera Selatan

Analisis terhadap kebijakan tersebut, akan mengadopsi model implementasi kebijakan dari Endward III, yang meliputi beberapa indikator yaitu:

Tabel Operasionalisasi Konsep

No	Konsep	Indikator
1.	Implementasi (George C Endward III 2002:168)	1. Komunikasi 2. Desposisi 3. Sumber Daya 4. Struktur Organisasi
2.	Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 Pasal 62 Tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	1. jenis Hewan serta jenis penyakit dan sifat penyakit Hewan. 2. Penanganan Hewan Sakit melalui Perawatan, depopulasi, eliminasi, euthanasia, pemotongan bersyarat dan/atau Pemusnahan Hewan di daerah tertentu. 3. oleh peternak, pemelihara, dan/atau Penanggung jawab Hewan Sakit atau terduga sakit dibawah pengawasan otoritas veteriner setempat

Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang-orang yang akan diwawancarai mengenai keterangan-keterangan yang berkaitan erat dengan penelitian yang sedang penulit teliti, penelitian ini menggunakan teknik wawancara salah satu pengumpulan data. Dalam hal ini informan yang akan diwawancarai dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel Informan Penelitian

No	Jabatan	Jumlah
1.	Kepala UPTD Rumah Sakit Hewan	1 Orang
2.	Kasubag TU	1 Orang
3.	Pemilik Hewan	3 Orang
4.	Kasi pelayanan medic veteriner	1 Orang
5.	Kasi penunjang medic veteriner	1 Orang
6.	Keamanan	1 orang
7.	Medis	3 orang
8.	Staf Farmasi	1 orang
Jumlah		12 orang

Menurut Wirawan, 2012:20. Informan adalah seseorang atau kelompok yang mempunyai keterampilan unik, atau latar belakang profesional yang berhubungan dengan isu atau intervensi program yang sedang diteliti sitilah key menunjukkan pada setiap orang yang dapat menyediakan informasi rinci dan pendapat berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya mengenai isu atau masalah tertentu yang berhubungan dengan objek penelitian.

Informan (narasumber) penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut. Informan dalam penelitian ini yaitu berasal dari wawancara langsung yang disebut sebagai narasumber. Dalam penelitian ini menentukan informan dengan menggunakan teknik purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu, yang benar-benar menguasai suatu objek yang peneliti teliti.

Peneliti beralasan menggunakan purposive sampling yaitu untuk mengumpulkan suatu data yang benar-benar real atau nyata dengan mewawancarai seorang informan yang dianggap mengetahui atau menguasai suatu keahlian atau pekerjaan tertentu dibidangnya. Sehingga dari purposive sampling tersebut yang peneliti gunakan untuk penelitian itu guna mempermudah pengolahan data untuk keperluan penelitian itu sendiri.

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari beberapa informan masyarakat Peternak atau Pemilik Hewan Kecamatan Sukarami Provinsi Sumatera Selatan. Masing-masing informan menurut peneliti telah mewakili terhadap fokus penelitian. Peneliti mendapatkan informan dari lingkungan dan hasil pencarian peneliti yang di bantu oleh beberapa teman.

Teknik Pengumpulan Data

Menurut Hardani (2010:103-104) Data dalam penelitian ini dapat dikelompokkan dalam dua (2) jenis data yaitu data Sekunder dan Primer

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang bersumber dari tempat objek penelitian, dan dikumpulkan dengan teknik sebagai berikut :

1. Observasi adalah teknik pengumpulan data dilakukan secara terencana dan sistematis dan langsung terjun kelokasi objek peneliti.
2. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung kepada informan tentang permasalahan penelitian

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang bersumber dari dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal-jurnal dan lain-lain sehingga tinggal mengutip dan mengevaluasi dengan teknis. Data ini dikumpulkan dengan data :

- a. Dokumentasi Dokumentasi dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang yang tertulis di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti dokumen, peraturan, dan sebagainya
- b. Studi Pustaka yaitu kegiatan mempelajari dan mengumpulkan data yang tertulis untuk menunjang penelitian data yang dikumpulkan berupa literatur yang berhubungan dengan topik permasalahan penelitian, baik dalam bentuk buku, artikel majalah, kamus, dan sebagainya

Teknik Analisa Data

Teknik analisa data merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang telah dikumpulkan dan diklasifikasikan sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif

Berdasarkan hal tersebut, maka analisa data dalam penelitian ini akan dilakukan langkah-langkah berikut :

a) Redukasi Data

Redukasi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyerdehanaan, pengabstrakan serta transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis di lapangan selama mengumpulkan data berlangsung terjadilah tahap redukasi, selanjutnya redukasi data atau proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan sampai laporan tersusun

b) Penyajian Data

Penyajian data merupakan alur yang paling penting dan berada pada urutan kedua dari kegiatan masalah pembatasan suatu “Penyajian” sebagai kesimpulan informasi yang tersusun memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan pengambilan tindakan

c) Penarikan Kesimpulan

Setelah dilakukan redukasi data dan penyajian data langkah yang terakhir yang dilakukan peneliti adalah dapat mengambil kesimpulan. Kesimpulan tersebut merupakan pokok permasalahan yang diteliti di Rumah Sakit

Hewan Kecamatan Sukarami Provinsi Sumatera Selatan.

Sebagaimana cara menganalisa data peneliti mengikuti langkah-langkah analisis yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (2009-96) Teknik analisis data dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa langkah yaitu reduksi data penyajian data dan penarikan kesimpulan dan langkah-langkah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Reduksi

Pengumpulan data penelitian dengan cara observasi, wawancara dokumentasi dan kepustakaan yang berhubungan dengan hal yang akan diteliti dengan melakukan catatan-catatan dari lapangan.

b. Penyajian data

Data yang telah diperoleh disajikan dalam bentuk daftar kategori kemudian ditafsirkan sehingga memberikan arti yang lebih luas dan disusun secara sistematis sehingga dapat menjelaskan masalah yang akan diteliti.

c. Mengambil Keputusan atau Verifikasi

Melakukan pemahaman terhadap informasi yang didapat dan dicari maknanya dari alur, pola dan penjelasan dan kemudian menarik pokok-pokok pikiran setelah memperoleh hasil penelitian

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

A. Implementasi

Implementasi Menurut Edward III dalam Purwanto, (2012:65) merupakan Tahap dari kebijakan publik sebagai proses untuk mewujudkan tujuan kebijakan sering disebut sebagai tahap yang penting (*Critical Satage*). Disebut penting karna tahapan ini merupakan “jembatan” antara dunia konsep dengan dunia realita. Penulis menggunakan teori Edward III untuk mendapatkan hasil penelitian dengan Indikator :

1. Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan di UPT Rumah sakit hewan Provinsi Sumatera Selatan. Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan sesuai dengan indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut.

Gambar Komunikasi antara Tim Medis dan Para Pemilik Hewan/ternak



Sumber : Diolah Peneliti

Berdasarkan hasil Observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan penulis di lapangan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh Para Medis sesuai Peraturan Pemerintah nomo 47 tahun 2014 tentang Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan di Rumah Sakit Hewan Provinsi Sumatera Selatan sudah baik sehingga dapat berkurangnya penyakit yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan berbagai penyakit tertular lainnya kepada hewan lain.

2. Sumber daya

Dalam sumber daya, meskipun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2014 tentang pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan di Rumah Sakit hewan provinsi Sumatera Selatan kekurangan sumber daya yang melaksanakannya maka implementasi tidak akan berjalan dengan efektif sumber daya tersebut dapat terwujud sumber daya manusia yakni implementator dan sumber daya finansial.

Gambar Tim Medis dan Paramedis Beserta staf pegawai



Sumber : Diolah Peneliti

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan penulis di lapangan bahwa ketersediaan sumber daya yang ada di Rumah Sakit Hewan Satuan perlu ditingkatkan jumlah personil/petugas Baik Medis Dan Paramedis dalam Penanganan Hewan sakit

Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2014 tentang Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan.

3. Disposisi Sikap dan Komitmen

Sikap dan komitmen ini merupakan suatu bentuk dari tingkah laku anggota/Staf dan Medis/paramedis dalam menjalankan komitmen dari instansi tersebut.

Gambar Sikap Medis terhadap pasien dan pemilik hewan



Sumber: Diolah Peneliti

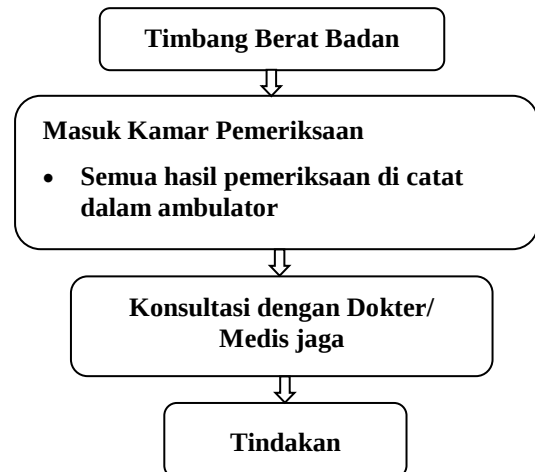
Berdasarkan keterangan pada gambar diatas terlihat sikap petugas Medis dan Paramedis dalam penanganan dan pemberian pengobatan terhadap hewan sakit di UPTD Rumah Sakit Hewan Provinsi Sumatera.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan penulis di lapangan, bahwa sikap dan komitmen yang dilakukan oleh Petugas Medis dan Paramedis dalam penanganan hewan sakit Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan di UPTD Rumah Sakit Hewan Provinsi Sumatera Selatan sudah baik sehingga dapat menciptakan suasana yang tenang dan tertib.

4. Struktur Birokrasi

Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerja sama banyak orang. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia maka hal ini menyebabkan sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan.

Tabel Standar Operasional Prosedur Pelayanan dan Penanganan Hewan Sakit di UPTD Rumah Sakit Hewan Provinsi Sumatera Selatan



Sumber : (SOP) Rumah Sakit Hewan Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan penulis di lapangan, bahwa Struktur birokrasi yang terlibat sudah baik karena saling berhubungan dengan harmonis sehingga dapat menegakkan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan dapat mengurangi dampak dari wabah penyakit hewan.

B. Penanganan Hewan Sakit (Pasal 62) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan

Penanganan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki satu arti yaitu berasal dari kata tangan yang memiliki arti sebagai sebuah tindakan yang dilakukan dalam melakukan sesuatu.

1. Dilakukan terhadap hewan sakit atau terduga sakit sesuai dengan jenis hewan serta jenis penyakit dan sifat penyakit hewan.

Gambar Sosialisasi jenis hewan, penyakit dan sifat penyakit hewan



Sumber : Diolah Peneliti

Berdasarkan keterangan pada gambar diatas terlihat petugas medis yang sedang mengamati jenis-enis hewan dan penyakit serta sifat penyakit hewan, beserta petugas paramedis lainnya yang sedang melakukan sosialisasi kepada pemilik hewan.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan penulis dilapangan, bahwa cara,sikap dan pengamatan berbagai jenis hewan dalam menyimpulkan berbagai penyakit dan sifat penyakit hewan tersebut sudah bisa dikatakan baik, baik itu berdasarkan pengamatan maupun dalam ketelitian menyimpulkan hasil yang di amati .

2. Penanganan Hewan Sakit Melalui, perawatan, depopulasi, eliminasi, euthanasia, pemotongan bersyarat/atau pemusnahan hewan di daerah tertentu.

Gambar Penanganan melalui perawatan, depopulasi, eliminasi, euthanasia, pemotongan bersyarat atau pemusnahan hewan di daerah tertentu.



Sumber: Kantor UPTD Rumah Sakit Hewan Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan keterangan dari gambar diatas terlihat petugas Medis sedang melakukan Penanganan melalui perawatan, depopulasi, euthanasia, eliminasi dan pemotongan bersyarat atau pemusnahan hewan didaerah tertentu, di wilayah Kecamatan Sukarami, Sukabangun II, Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan penulis dilapangan, bahwa memang benar yang terlihat dari beberapa informasi nasrasumber sudah adanya penanganan melalui perawatan, depopulasi, eliminasi, euthanasia dan pemotongan bersyarat atau pemusnahan hewan didaerah tertentu walaupun penulis belum menjumpai penanganan tersebut dilapangan yang dilakukan oleh Tim Medis yang diadakan dalam waktu tertentu aja bukan setiap hari.

3. Dilakukan oleh peternak, pemelihara, dan penanggung jawab hewan dibawah pengawasan otoritas veteriner setempat

Gambar Proses pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan melalui Penanganan yang dilakukan oleh tim Medis UPTD RSH Provinsi SUMSEL



Sumber: Diolah Peneliti

Berdasarkan keterangan pada gambar diatas terlihat petugas Medis dan Paramedis sedang beroperasi melakukan tindakan Penanganan terhadap hewan sakit di lingkungan masyarakat UPTD Rumah Sakit Hewan Provinsi Sumatera Selatan serta memberikan sosialisasi kepada pemilik hewan.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan penulis di lapangan, bahwa cara, sikap, dan penanganan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dalam men-sosialisasikan pengendalian dan penang-gulangan penyakit hewan kepada para pemilik hewan bisa dikatakan sudah baik dan sudah dilaksanakan dengan seperlunya di UPTD Rumah sakit hewan provinsi sumatera selatan walaupun masih ada beberapa kehilafan dalam mengabaikan prosedurnya.

Pembahasan

Hasil penelitian dapat dilihat kembali pada teori yang digunakan peneliti dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan teori Implementasi menurut George C. Edward III yang selanjutnya digunakan sebagai indikator untuk mengukur Implementasi Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2014 tentang Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan di rumah sakit hewan provinsi sumatera selatan (studi kasus pasal 62)

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan di Rumah Sakit Hewan Provinsi Sumatera Selatan (Studi Kasus Pasal 62)

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka penulis akan membahas Implementasi Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan di UPTD Rumah Sakit Hewan Provinsi Sumatera Selatan (Studi Kasus Pasal 62) dinilai dari dua variable.

Implementasi Merupakan Tahap dari kebijakan publik sebagai proses untuk mewujudkan tujuan kebijakan sering disebut sebagai tahap yang penting (*Critical Satage*). Disebut penting karna tahapan ini merupakan “jembatan” antara dunia konsep dengan dunia realita. Purwanto, (2012:65)

Impelementasi menurut teori Lester dan Estewert dalam kusumanegara, (2010:97) Implementasi adalah sebuah tahapan yang dilakukan setelah aturan hukum ditetapkan melalui proses politik. Kalimat tersebut seolah-olah menunjukkan bahwa implementasi lebih bermakna non politik, yaitu administrative.

Keberhasilan Implementasi Menurut Edward III dalam Indiahono, (2009:31-33) dipengaruhi oleh isi kebijakan yang mencakup sebagai berikut:

1. Komunikasi

Komunikasi dalam hal ini sangat menentukan keberhasilan suatu pencapaian tujuan. Apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan dikomunikasikan pada kelompok sasaran, dalam hal implementasi semua warga terlibat sebagai sasaran dan sekaligus sebagai pelaksana dari kebijakan yang di implementasikan.

Komunikasi antar Petugas Medis dan pelayanan Medis veteriner terjalin dengan baik, jarang sekali terjadi miss communication. Sedangkan komunikasi antara petugas kepada Pemilik Hewan dan kepada masyarakat sudah cukup baik, hanya saja ada beberapa oknum pemilik Hewan yang masih saja melanggar kebijakan yang di tetapkan pemerintah melalui petugas Pelayanan medis dan administrasi.

Berdasarkan dari hasil penelitian di UPTD Rumah Sakit Hewan Provinsi Sumatera Selatan penulis membahas bahwa komunikasi dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan di Rumah Sakit Hewan Provinsi Sumatera Selatan (stidu kasus pasal 62). Yang di terapkan melalui sumber daya manusia dalam suatu organisasi memiliki peranan yang sangat penting. Untuk mencapai tujuan tersebut pada dasarnya manusia saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya.

Komunikasi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu organisasi. Komunikasi yang baik memungkinkan semua pekerjaan berjalan sesuai dengan apa diharapkan. Apabila komunikasi organisasi tersebut tidak berjalan dengan baik, maka mekanisme organisasi akan terganggu. Komunikasi dalam sebuah organisasi umumnya terjadi dalam dua konteks, yaitu komunikasi yang terjadi di dalam (internal communication) dan komunikasi yang terjadi di luar (external communication).

Dengan adanya komunikasi baik secara internal maupun eksternal di UPTD Rumah Sakit Hewan Provinsi Sumatera Selatan, komunikasi petugas dan masyarakat atau pemilik Hewan kurangnya respon dari masyarakat mengingat pelaksanaan kebijakan dalam penyelenggaraan dan proses pada Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2014 tentang Pengendalian dan penanggulangan Penyakit hewan dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat sangat berpengaruh besar keberhasilan suatu kebijakan yaitu mengulas dari tahap implementasi, monitoring, sampai tahap pelaporan.

2. Sumber Daya

Sumber daya dalam implementasi merupakan suatu peraturan dan juga berperan penting untuk pencapaian tujuan. Dalam hal ini yang menjadi sumber daya adalah sumber daya manusia (SDM).

Berdasarkan dari hasil penelitian di UPTD Rumah Sakit hewan Provinsi Sumatera Selatan penulis membahas bahwa Ketersediaan Sumber daya manusia di UPTD Rumah Sakit Hewan Provinsi Sumatera Selatan Subjektif atau bisa dikatakan kurang dan belum memadai sehingga implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Pasal 62 belum efektif.

Setiap sumber daya yang ada di UPTD Rumah Sakit Hewan Provinsi Sumatera Selatan mempunyai Sumber Daya Manusia yang kurang terlihat dari jumlah petugas baik itu Pegawai Negeri Sipil Maupun Non Pegawai Negeri Sipil.

3. Disposisi

Dalam penyampaian Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Pasal 62 karakter yang penting dimiliki oleh pelaksanaan program kebijakan adalah kejujuran dan tingkat komitmen yang senantiasa konsisten.

Berdasarkan hasil penelitian ini penulis membahas bahwa disposisi merupakan sikap dari

pelaksana kebijakan yaitu mencakup kewenangan, sikap, karakter dari implementor utama kebijakan kepada Masyarakat. Jika pelaksanaan kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam prakteknya terjadi bias.

Dukungan dan kemampuan para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab sangat mempengaruhi proses Implementasi. Dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan penyakit hewan pasal 62 Karakter yang ditujukan dimiliki pelaksana adalah kejujuran dan tingkat komitmen yang senantiasa konsisten.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang bertugas mengimplemen-tasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang paling penting dari setiap organisasi adalah adanya Standar Operasional Prosedur (SOP). Dalam menjalankan tugas sesuai birokrasi yang tertip, teratur, terarah serta sesuai dengan standar prosedur dengan baik dan tidak melenceng dari tugas dan tanggung jawabnya.

Berdasarkan hasil penelitian di UPTD Rumah sakit hewan provinsi sumatera selatan bahwa struktur di perlukan agar aliran pekerjaan dan pelaksanaan program serta adanya kontan aktif Sardinasi yang baik dari berbagai mekanisme, perjenjangan, standarisasi, regulasi, dan para Petugas sebagai subjek pelaksanaan kebijakan yang begitu kompleks menurut adanya kerjasama banyak orang. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal lain akan membuat sebagian sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalanya suatu kebijakan.

Beberapa hasil dari wawancara pada informan di atas bahwa dalam menjalankan suatu kebijakan diperlukan koordinasi yang efektif antara lembaga-lembaga terkait dalam mendukung implementasi sesuai birokrasi yang tertib, teratur terarah, serta standar prosedur (SOP) dengan baik dan tidak melenceng dari tugas dan tanggung jawab.

SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan Uraian Hasil penelitian tentang Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan

penulis akan memberikan simpulan berdasarkan uraian bab-bab terdahulu yang bersumber pada UPTD Rumah Sakit Hewan Provinsi Sumatera Selatan dan juga bersumber pada teori-teori yang di dapat oleh penulis, maka penulis dapat memberikan beberapa simpulan yaitu :

1. Implementasi Peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2014 tentang Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan di UPTD Rumah Sakit Hewan Provinsi Sumatera Selatan (Studi Kasus Pasal 62) sudah berjalan dengan karena dari tata cara Pengendalian, penanggulangan, serta penanganan penyakit hewan sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan Standar Operasional prosedur dan bisa di mengerti dan di terapkan oleh masyarakat.
2. Faktor yang menjadi penghambat Impelementasi Peraturan Pemerinta Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengndalian an penang-gulangan penyakit hewan di UPTD Rumah Sakit Hewan Provinsi Sumatera selatan (Studi Kasus Pasal 62) sudah berjalan dengan cukup baik karena dari tata cara pengendalian, penanggulangan dan penanganan penyakit hewan sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan standar oprasional prosedur dan bisa di terapkan oleh masyarakat.

2. Saran

Berdasarkan Simpulan di atas, maka peneliti dapat memberikan saran yang mungkin bermanfaat bagi UPTD Rumah Sakit Hewan Provinsi Sumatera Selatan yaitu:

1. Hendaknya memperbaiki kondisi ketersediaan jumlah sumber daya manusia yang ada supaya lebih efektif dalam mengimplementasikan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan di UPTD Rumah Sakit Hewan Provinsi Sumatera Selatan (Pasal 62)
2. Agar mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Penanggulangan penyakit hewan di UPTD Rumah Sakit Hewan lebih efektif dalam Penaganan Penyakit Hewan yang sudah baik agar dipertahankan bila perlu harus di tingkatkan.

F. DAFTAR PUSTAKA

Author, Rozaq, Ishaq Bani. 2021. Sistem Informasi Diagnose Penyakit Hewan Ternak di Dinas Peternakan Subang. Subang : Universitas Subang.



- Abdul Wahab, Soliehin, 2008 : Analisis Kebijakan : Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara, Edisi Kedua, Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Edward C George. 2008. IplementingPublic, Policy. Jakarta.
- Grindle. Merilee S. 2013. Politics and Policy Implementation In The Third World, Pricnton University Press, New Jersy.
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan
- Pergub Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Rumah Sakit Hewan. Sumatera Selatan: Kementrian Kesehatan.
- Supardi, DKK, STIA, 2019, Buku Panduan Skiripsi, Palembang : STIA SATYA Negara.
- Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kualitatf Kuantitatif, dan R & D. Bandung Alfabeta
- Subarsono, AG. 2009. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta : Pustaka Belajar.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

